

BAB 1 : PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Evaluasi Manajemen Program Kesehatan Reproduksi Pada Saat Bencana di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Tahun 2018 yaitu :

1. Komponen Input

- a. Kebijakan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung yaitu masih berpendoman pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PPAM, namun belum memiliki peraturan daerah yang khusus untuk pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung yaitu tenaga kesehatan dari Puskesmas yang terdiri dari tenaga kesehatan umum yaitu dokter, bidan, dan perawat, dan dibantu oleh tenaga dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan dibantu oleh instansi terkait yang sebagian dari tim tersebut sudah mendapatkan pelatihan tanggap darurat bencana.
- c. Dana yang dialokasikan khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana tidak dibuat secara khusus, namun sudah tergabung dalam program penanggulangan bencana secara umum yang bersumber dari APBD, APBN, dan DPA.
- d. Sarana dan Prasarana penunjang dalam program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung sudah memadai dan mencukupi.

2. Komponen Proses

a. Perencanaan

Perencanaan kegiatan untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung masih berupa sosialisasi saja dan belum ada usulan perencanaan secara tertulis.

b. Pengorganisasian

Struktur organisasi atau tim khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung masih belum ada.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung sudah terlaksana berupa pendataan, penilaian kebutuhan, memberikan pelayanan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal, karena kurangnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat di pengungsian mengenai adanya pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana.

d. Pengawasan

Pengawasan untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung, sudah dilaksanakan secara berkala setiap hari oleh tim di bidang penanggulangan bencana dan bidang kesga gizi dari dinas kesehatan, bekerjasama juga dengan tenaga kesehatan atau petugas piket dari puskesmas, tim penanggulangan bencana dari BPBD dan tim TAGANA dari Dinas Sosial.

3. Komponen Output

Cakupan indikator untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung yaitu pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana

kepada masyarakat sudah terlayani, kebutuhan logistik sudah terpenuhi, dan masalah-masalah pada saat bencana sudah tertangani dengan baik. Tidak ada kendala dalam pelayanan kesehatan reproduksi, hal ini karena skala kejadian bencana di Kabupaten Sijunjung masih tergolong rendah dan waktu kejadian bencananya tidak terlalu lama. Namun pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Sijunjung secara keseluruhan masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat di pengungsian mengenai adanya pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana. Selain itu, belum ada kebijakan atau peraturan daerah setempat dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana, belum adanya perencanaan khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, dan belum ada pembentukan tim khusus kesehatan reproduksi pada saat bencana.

1.2 Saran

- 1). Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
 - a. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk membuat kebijakan khusus atau peraturan daerah setempat, dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana, sehingga pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana bisa berjalan dengan baik dan lancar.
 - b. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk membentuk struktur organisasi, memilih seorang koordinator kesehatan reproduksi atau tim khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana,

memberikan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi tanggap darurat bencana kepada seluruh tim khusus kesehatan reproduksi, agar tim khusus kesehatan reproduksi memiliki kemampuan dan keahlian pada situasi tanggap darurat.

- c. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk mengalokasikan dana khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, agar tidak ada lagi kendala dalam melaksanakan program kesehatan reproduksi pada saat bencana.
- d. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk membuat usulan perencanaan yang khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, supaya ada kejelasan mengenai kegiatan-kegiatan atau program kesehatan reproduksi yang akan dilaksanakan jika suatu saat terjadi lagi bencana.
- e. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana dengan berkoordinasi dengan lintas sektor supaya segala kebutuhan masyarakat terdampak bencana, khususnya kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi dapat terpenuhi.

2). Bagi Puskesmas Lubuk Tarok

- a. Diharapkan kepada Puskesmas Lubuk Tarok untuk membuat kebijakan khusus atau Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana, sehingga pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana bisa berjalan dengan baik dan lancar.

- b. Diharapkan kepada Puskesmas Lubuk Tarok untuk membentuk struktur organisasi, memilih seorang koordinator kesehatan reproduksi atau tim khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, memberikan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi tanggap darurat bencana kepada seluruh tim khusus kesehatan reproduksi, agar tim khusus kesehatan reproduksi memiliki kemampuan dan keahlian pada situasi tanggap darurat.
 - c. Diharapkan kepada Puskesmas Lubuk Tarok untuk membuat usulan perencanaan yang khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, supaya ada kejelasan mengenai kegiatan-kegiatan atau program kesehatan reproduksi yang akan dilaksanakan jika suatu saat terjadi lagi bencana.
 - d. Diharapkan kepada Puskesmas Lubuk Tarok untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana dengan berkoordinasi dengan lintas sektor supaya segala kebutuhan masyarakat terdampak bencana, khususnya kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi dapat terpenuhi.
- 3). Bagi BPBD Kabupaten Sijunjung
- a. Diharapkan kepada BPBD Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan seluruh instansi yang terlibat dalam program penanggulangan bencana, untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana sebelumnya, guna perbaikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di masa mendatang.
 - b. Diharapkan kepada BPBD Kabupaten Sijunjung untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi tanggap darurat bencana, tidak hanya untuk beberapa orang saja tetapi kepada seluruh tim penanggulangan

bencana, supaya seluruh tim penanggulangan bencana memiliki kemampuan dan keahlian dalam situasi tanggap darurat bencana.

- c. Diharapkan kepada BPBD Kabupaten Sijunjung untuk tetap menganggarkan dana darurat atau dana tidak terduga dalam usulan rencana kegiatan program penanggulangan bencana, sehingga jika terdapat kekurangan dana saat melaksanakan program, bisa menggunakan dana tersebut dan kegiatan operasional pada saat bencana bisa berjalan dengan lancar.

4). Bagi Dinas Sosial

- a. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan seluruh instansi yang terlibat dalam program penanggulangan bencana, untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana sebelumnya, guna perbaikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di masa mendatang.
- b. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi tanggap darurat bencana, tidak hanya untuk beberapa orang saja tetapi kepada seluruh tim penanggulangan bencana, supaya seluruh tim penanggulangan bencana memiliki kemampuan dan keahlian dalam situasi tanggap darurat bencana.
- c. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung untuk tetap menganggarkan dana darurat atau dana tidak terduga dalam usulan rencana kegiatan program penanggulangan bencana, sehingga jika terdapat kekurangan dana saat melaksanakan program, bisa menggunakan dana tersebut dan kegiatan operasional pada saat bencana bisa berjalan dengan lancar.

